

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2021. LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.

LKjIP yang disusun Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2023 serta dokumen Rencana Kerja tahun 2023 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program kedepan dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan dimasa mendatang.

Demikian LKjIP Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2023, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Blitar, 28 Februari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana


PARMINTO., S.Sos., M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199301 1 001

EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Wali Kota di bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 yang didalamnya memuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, DP3AP2KB Kota Blitar mengemban dua misi Pemerintah Kota Blitar, yaitu :

- I. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- II. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas Berkarakter

Berdasarkan dua misi tersebut, ditetapkanlah 3 (tiga) tujuan Strategis dari Dinas P3AP2KB Kota Blitar yang harus dicapai sesuai target dimana untuk tujuan Strategis pertama memiliki 3 (tiga) sasaran kinerja; Tujuan Strategis ke 2 (dua) mempunyai 1 (satu) sasaran kinerja dan tujuan strategis ke 3 (tiga) mempunyai 1 (satu) sasaran kinerja. Berikut capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 :

1. Tujuan I

Menurunnya Kesenjangan Gender ; dengan sasaran strategis :

- a. Kelembagaan PUG yang aktif : dengan indikator sasaran Persentase Kelembagaan PUG yang aktif terealisasi sebesar 63,3 % dari target 47,28 % atau dengan capaian sebesar 133,88% dengan kategori *sangat berhasil*.
- b. Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan ; dengan indikator sasaran *Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan* terealisasi 100 % dari target 100% atau dengan capaian sebesar 100 % dengan kategori *sangat berhasil*.
- c. Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak; dengan indikator sasaran *Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan* terealisasi 100 % dari target 100% atau dengan capaian sebesar 100 % dengan kategori *sangat berhasil*.

2. Tujuan II

Meningkatnya Pengendalian Penduduk; dengan sasaran strategis :

Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) dengan indikator sasaran *Total Fertility Rate (rata-rata anak yang dilahirkan oleh Ibu selama masa reproduksi)* terealisasi 1,92 dari target yaitu 2,13 atau dengan capaian sebesar 109,86% dengan kategori **sangat berhasil**.

3. Tujuan III

Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah; dengan sasaran strategis :

Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator sasaran *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* terealisasi dengan nilai 85,28 predikat A dari target predikat A, atau dengan capaian sebesar 100 % dengan kategori **sangat berhasil**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas P3AP2KB Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja utama yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh seluruh bidang. Pada tahun 2023 anggaran yang teralokasi untuk Dinas P3AP2KB Kota Blitar sebesar Rp 8.626.677.777,00 dengan persentase serapan anggaran pada tahun 2023 sebesar 92,24%. Dari ketiga sasaran Renstra Dinas P3AP2KB Kota Blitar, ada yang sesuai target ataupun diatas target. Berikut capaian kinerja, anggaran dan tingkat efisiensi dari tiap-tiap sasaran :

1. Sasaran 1 : *Kelembagaan PUG aktif*

dengan indikator Prosentase capaian kinerja untuk *kelembagaan PUG aktif* ini sebesar 133,88 % dan prosentase penyerapan anggarannya sebesar 97,51 % dengan tingkat efisiensi 1,21.

2. Sasaran 2 : *Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan*

Dengan indikator *Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan*. Prosentase capaian kinerja sebesar 100 % dan untuk prosentase penyerapan anggarannya sebesar 50,05 % dengan tingkat efisiensi 1,99.

3. Sasaran 3 : *Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak*

Dengan indikator *Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan*. Prosentase capaian kinerja sebesar 100 % dan prosentase penyerapan anggaran sebesar 79,21 % dengan tingkat efisiensi 1,26.

4. Sasaran 4 : *Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)*

Dengan indikator *Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)*. Prosentase capaian kinerja 110,28% dan prosentase penyerapan anggaran 75,18 % dengan tingkat efisiensi 1,46.

5. Sasaran 5 : *Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah*

Dengan indikator sasaran *Nilai SAKIP Perangkat Daerah*. Prosentase capaian kinerja 104,05% dan capaian penyerapan anggaran 97,24 % dengan tingkat efisiensi 1,07.

Prestasi yang berhasil diraih DP3AP2KB Kota Blitar pada tahun 2023 ini yaitu : 1) Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan ***kategori Pratama***; 2) Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan ***kategori Madya***; 3) *Juara I Lomba Kelompok KB Pria Tingkat Provinsi Jawa Timur*; 4) *Juara I Lomba Kampung KB Kategori Pengembangan Pengelolaan Kampung KB Tingkat Kabupaten/Kota*; 5) *Juara I Lomba Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) tingkat Provinsi Jawa Timur*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
EXECUTIVE SUMMARY.....	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	3
D. DASAR HUKUM.....	4
E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS.....	6
F. ISU – ISU STRATEGIS.....	6
BAB II.....	7
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	7
A. RENCANA STRATEGIS.....	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022.....	10
BAB III.....	12
AKUNTABILITAS KINERJA.....	12
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN.....	12
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARAKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022.....	13
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 – 2022.....	19
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d. AKHIR PERIODE RENSTRA.....	20
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL.....	21
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME).....	23
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN.....	29
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN.....	31
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	33
C. PRESTASI / PENGHARGAAN.....	34
BAB IV.....	36
PENUTUP.....	36
A. KESIMPULAN.....	37
B. LANGKAH PERBAIKAN.....	37
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan.....	9
TABEL II.2 Target Kinerja Sasaran Strategis.....	11
TABEL III.1 Skala Pengukuran Kinerja Sasaran.....	13
TABEL III.2 Pencapaian Kinerja DP3AP2KB.....	14
TABEL III.3 Pencapaian Target Pada Perjanjian Kinerja.....	18
TABEL III.4 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	19
TABEL III.5 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhi Periode Renstra 2021-2026.....	20
TABEL III.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Daerah dengan Kab/Kota Lain.....	22
TABEL III.7 Persentase Realisasi Anggaran sesuai Jenis Belanja.....	23
TABEL III.8 Persentase Realisasi Anggaran Per Urusan.....	24
TABEL III.9 Persentase Relaisai Anggaran Per Program/Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	24
TABEL III.10 Persentase Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	27
TABEL III.11 Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan.....	29
TABEL III.12 Capaian Kinerja dan Anggaran.....	31
TABEL III.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya ditujukan untuk lebih mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip – prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu tujuan utama otonomi daerah adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas serta penegakan hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kepemimpinan yang transparan dan akuntabel agar berbagai kebijakan yang diimplementasikan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023. Pelaksanaan RKPD tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam RPJMD Kota Blitar 2021-2026 dengan tema **“KOTA BLITAR KEREN : Unggul, Makmur, dan Bermartabat”**. Oleh karena itu pencapaian kinerja dalam LKjIP tahun 2022 ini didasarkan pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Blitar Tahun 2023 serta target RPJMD 2021-2026.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 7), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah.

Lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Perlindungan Perempuan;
- f. Penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan kebijakan Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- g. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Perlindungan Khusus Anak
- h. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pengendalian Penduduk
- i. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- j. Perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (bidang ketahanan keluarga pemberdayaan perempuan)
- k. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. Pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatusahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- m. Pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;

- n. Penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- p. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- q. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- r. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- s. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- t. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atau capaian kinerja instansi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah untuk menilai, mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran yang dinilai berdasarkan tolok ukur dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan dan menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar tahun 2023 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
 16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023;
 17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar;
 19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022 – 2026;
 20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
 21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
 24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

E. ASPEK – ASPEK STRATEGIS

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan di berbagai bidang baik bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, sosial, budaya dan pelayanan publik yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat. DP3AP2KB Kota Blitar dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan urusan wajib pelayanan non dasar yaitu Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Dalam pemenuhan harapan tersebut, DP3AP2KB Kota Blitar memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kendala-kendala dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan antara lain :

1. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
2. Meningkatkan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana
3. Meningkatkan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak

F. ISU – ISU STRATEGIS

DP3AP2KB Kota Blitar merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Blitar, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar sebagai berikut:

1. Menurunnya kesenjangan gender
2. Kelembagaan PUG yang semakin aktif
3. Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan
4. Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak
5. Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk
6. Menurunkan TFR (Total Fertility Rate)

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra PD memuat tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada Rencana Program jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Renstra DP3AP2KB Kota Blitar periode Tahun 2021 – 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian K/L, Renstra Provinsi Jawa Timur dan juga evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya. Selain itu juga identifikasi dan telaah dari RTRW.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai pada tahun 2022, serta juga menyebutkan program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja DP3AP2KB Kota Blitar memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun yang bersangkutan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Perjanjian Kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 2026

Rencana Strategis DP3AP2KB Kota Blitar termuat dalam Dokumen Renstra PD yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, yang disusun berpedoman kepada RPJMD, Visi dan Misi Pembangunan Kota Blitar dan bersifat indikatif.

Visi Pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada tahun 2021-2026 adalah : Terwujudnya Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur dan Bermartabat. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat lima misi yang akan dilaksanakan, yaitu :

- I. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- II. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- III. Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital
- IV. Meningkatkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- V. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Berpedoman pada visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Blitar sebagai mana termuat dalam RPJPD Kota Blitar 2005-2025 dan RPJMD tahun 2021-2026 tersebut, DP3AP2KB Kota Blitar menetapkan Rencana Strategis 2021-2026 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan, potensi dan isu-isu strategis, serta tantangan DP3AP2KB Kota Blitar lima tahun kedepan, sehingga terwujud pembangunan yang berkesinambungan sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis menuju Kota Blitar lebih baik, dan lebih sejahtera.

Dinas P3AP2KB Kota Blitar mengampu 2 urusan pemerintahan yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka tujuan Renstra Dinas P3AP2KB mengacu pada 2 (Dua) misi Kota Blitar yaitu :

- I. Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- II. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

Berdasarkan dua misi tersebut, ditetapkan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Kebijakan jangka menengah Dinas P3AP2KB yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB, sebagai berikut :

Tabel II. 1

Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

DP3AP2KB KOTA BLITAR

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan	Menurunnya kesenjangan gender	Kelembagaan PUG yang aktif	Peningkatan implementasi kebijakan responsif gender	Penyusunan payung hukum tentang PUG
				Peningkatan kapasitas perempuan
				Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik
				Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal
		Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Peningkatan pemenuhan hak-hak anak	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
		Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Optimalisasi penyelenggaraan program pengendalian penduduk, Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera	Peningkatan partisipasi peserta KB aktif
				Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB
				Peningkatan kerjasama antar Stakeholders

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun)
				Optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja
				Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Implementasi penjabaran Rencana Strategis dalam rangka mencapai kinerja DP3AP2KB Kota Blitar, dituangkan dalam dokumen perencanaan berupa Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja ini didasarkan kepada Rencana Kinerja Tahunan yang didalamnya memuat indikator kinerja beserta targetnya.

Perjanjian Kinerja pada DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2023 ada 4 (empat) tingkatan yaitu :

- 1) Perjanjian Kinerja antara Kepala DP3AP2KB Kota Blitar dengan Walikota Blitar
- 2) Perjanjian Kinerja antara Eselon III dengan Kepala DP3AP2KB Kota Blitar
- 3) Perjanjian Kinerja antara Eselon IV dengan Eselon III atau pejabat fungsional dengan eselon III
- 4) Perjanjian Kinerja antara eselon III atau eselon IV dengan pelaksana

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II. 2

Target Kinerja Sasaran Strategis DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja
Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase Kelembagaan PUG aktif	47,28 %
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100 %
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %
Menurunnya Total Fertility Rate	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	2,13
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83)

Untuk melaksanakan sasaran strategis diatas, DP3AP2KB Kota Blitar didukung dengan anggaran pada P-APBD tahun 2023 sebesar Rp. 8.626.677.777,00 dengan rincian per program adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota; dengan anggaran Rp. 3.873.447.321,00
2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dengan anggaran Rp. 1.037.246.962,00
3. Program Perlindungan Perempuan; dengan anggaran Rp. 171.587.963,00
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dengan anggaran Rp. 120.380.794,00
5. Program Perlindungan Khusus Anak; dengan anggaran Rp. 191.567.661,00
6. Program Pengendalian Penduduk; dengan anggaran Rp. 233.224.556,00
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana; dengan anggaran Rp. 2.090.401.289,00
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS); dengan anggaran Rp. 908.821.231,00

Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan DP3AP2KB Kota Blitar tahun 2023 secara terperinci sebagaimana dalam lampiran 3 LKjIP 2023.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA / SASARAN

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam implementasi system AKIP, Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkomitmen memberikan pernyataan keberhasilan atas komitmen kinerja yang ingin diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan/atau sasaran.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023, realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022), serta realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA 2016-2021. Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Prosentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja dengan kriteria, yaitu :

Tabel III. 1
Skala Pengukuran Kinerja Sasaran

NO	NILAI CAPAIAN KINERJA		PREDIKAT
	%	KETERANGAN PROSENTASE	
1	85 % - 100 %	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70 % s.d < 85 %	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55 % s.d < 70 %	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55 %	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARAKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023

Pengukuran kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2022 menggunakan metode seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel III.2 berikut.

Tabel III. 2
Pencapaian Kinerja DP3AP2KB Kota Blitar Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian	Predikat
Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase Kelembagaan PUG aktif	47,28 %	63,3%	133,88%	Sangat Berhasil
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	Sangat Berhasil
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	2,13	1,92	109,86%	Sangat Berhasil
Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (83,00)	A (85,28)	102,74 %	Sangat Berhasil

Penjabaran analisis pencapaian kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran 1 : Kelembagaan PUG yang aktif, dengan indikator kinerja Persentase kelembagaan PUG aktif; memperoleh capaian sebesar 133,88% dengan predikat **Sangat berhasil**

Keterangan :

- 1) Jumlah lembaga di Kota Blitar yang melaksanakan PUG ada 29 lembaga, sedangkan lembaga yang ada di Kota Blitar berjumlah 29 lembaga
- 2) Formulasi penghitungan indikator sasaran *Kelembagaan PUG yang aktif* adalah Jumlah lembaga yang melaksanakan PUG di bagi jumlah lembaga yang ada di Kota Blitar di kali 100%. Persentase Kelembagaan PUG yang aktif sebesar 63,3%
- 3) Jumlah anggota lembaga aktif sebanyak 9.831 orang, sedangkan jumlah seluruh anggota lembaga ada 15.523 orang.
- 4) Pada indikator kinerja *Kelembagaan PUG yang aktif* terealisasi 63.3 % dari target 47,28% dengan persentase capaian 133,88% dengan kategori Sangat berhasil.
- 5) Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu :
 - a) Tidak semua anggota lembaga di Kota Blitar aktif dalam penyelenggaraan pengarusutamaan gender
- 6) Tindak lanjut/action plan untuk sasaran ini adalah :
 - a) Rapat Koordinasi dengan Tim Driver terkait upaya peningkatan lembaga aktif PUG
 - b) Penyusunan Perwali tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2023
 - c) Lebih intens mendatangi langsung dalam memberikan edukasi lembaga untuk ikut PUG

b. Sasaran 2 : Meningkatkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan; memperoleh capaian sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**

Keterangan :

- 1) Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan di Kota Blitar ada 11 orang, sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di Kota Blitar berjumlah 11 orang.
- 2) Formulasi penghitungan indikator sasaran *Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan* adalah persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus perempuan yang dilaporkan. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan sebesar 100 %
- 3) Pada indikator kinerja *Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang*

diselesaikan terealisasi 100 % dari target 100% dengan persentase capaian 100 % dengan kategori Sangat berhasil.

- 4) Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu :
Di Kota Blitar sudah didirikan PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang berfungsi untuk wadah keluarga berdiskusi bila ada masalah, tapi sampai saat ini PUSPAGA ini belum berjalan optimal sehingga pelayanan kepada keluarga khususnya dalam hal perlindungan kekerasan terhadap perempuan juga masih belum maksimal, sehingga kasus yang lapor hanya sedikit jadi realisasi anggaran untuk kasus pendampingan juga hanya sedikit, sesuai jumlah kasus yang ditangani
- 5) Tindak lanjut/action plan untuk sasaran ini adalah :
Untuk menjaga tingkat responsif penyelesaian kasus tetap 100% antara lain :
 - a. Lebih mengoptimalkan peran PUSPAGA melalui pertemuan dan koordinasi dengan Satgas dan lembaga lain
 - b. Pembentukan Pos Curhat di masing-masing kelurahan.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak; memperoleh capaian sebesar 100 % dengan predikat **sangat berhasil**

Keterangan :

- 1) Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan di Kota Blitar ada 24 orang, sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan di Kota Blitar berjumlah 24 orang.
- 2) Formulasi penghitungan indikator sasaran *Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak* adalah persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak yang dilaporkan. Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan sebesar 100 %
- 3) Pada indikator kinerja *Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan* terealisasi 100 % dari target 100% dengan persentase capaian 100 % dengan kategori Sangat berhasil.
- 4) Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu :
Rumah aman sudah tersedia tapi belum dimanfaatkan karena belum ada klien yang membutuhkan sehingga anggaran untuk rumah aman tidak bisa diserap
- 5) Tindak lanjut/action plan untuk sasaran ini adalah :
 - a. Peningkatan kualitas SDM yang menangani perlindungan anak

- b. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak kekerasan untuk memanfaatkan rumah aman
- c. Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak

d. Sasaran 4 : Menurunnya Total Fertility Rate (TFR); memperoleh capaian sebesar 109,86 % dengan predikat **sangat berhasil**

Keterangan :

- 1) Jumlah perempuan usia subur (15-19 tahun) pada tahun 2022 yang melahirkan 8 orang. Sedangkan perempuan usia subur (yang berumur 15-19 tahun) di tahun 2022 berjumlah 6.120 orang.
- 2) Formulasi penghitungan indikator sasaran *Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)* adalah Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seseorang wanita selama masa reproduksinya. TFR sebesar 1,92
- 3) Pada indikator kinerja *Total Fertility Rate (TFR)* terealisasi 1,92 dari target 2,13 dengan persentase capaian 109,86 % dengan kategori Sangat berhasil.
- 4) Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu :
 - a. Belum optimalnya kapasitas dan pengetahuan SDM pengelola program pengendalian penduduk utamanya dalam pemanfaatan teknologi informasi pengendalian penduduk
 - b. Belum optimalnya peran motivator KB dalam peningkatan kesertaan KB Pria
 - c. Belum optimalnya peran Tim Pendukung Keluarga (TPK) dalam melakukan pendampingan keluarga beresiko stunting
- 5) Tindak lanjut/action plan untuk sasaran ini adalah :
 - a. Pelatihan SDM pengelola pengendalian penduduk dan mitra kerja
 - b. Perumusan strategi optimalisasi peningkatan KB Pria
 - c. Pelatihan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam pendampingan Keluarga Beresiko Stunting

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah; memperoleh capaian sebesar 102,74 dengan predikat **sangat berhasil**

Keterangan :

- 1) Pada indikator kinerja sasaran *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* terealisasi dengan kategori A (85,28) dari target A (83) dengan persentase capaian 102,74

% dengan kategori Sangat berhasil.

2) Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran ini yaitu :

Tidak ada kendala mendasar yang dihadapi

3) Tindak lanjut/action plan untuk sasaran ini adalah :

Meskipun tidak ada kendala yang mendasar yang dihadapi, namun penyelenggaraan administrasi Perangkat Daerah yang baik dalam rangka Implementasi SAKIP akan senantiasa ditingkatkan

Keberhasilan/kegagalan pencapaian target pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel III.3 berikut.

Tabel III.3
Pencapaian Target pada Perjanjian Kinerja
DP3AP2KB KOTA BLITAR TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase Kelembagaan PUG aktif	133,88%	V			
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100 %	V			
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %	V			
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	109,86 %	V			

Meningkatnya kinerja Peragkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	102,74 %	V			
Rata-rata keberhasilan capaian sasaran strategis		109,30 %	Sangat Berhasil			

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022 – 2023

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel III. 4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 - 2023

DP3AP2KB KOTA BLITAR

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase Kelembagaan PUG aktif	47,26%	47,28%	55,03	63,3	116,44%	133,88%
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	2,14	2,13	1,92	1,92	110,28%	109,86%

Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,00	83	85,32	85,28	104,04 %	102,74%
---------------------------------------	------------------------------	-------	----	-------	-------	----------	---------

Dari perbandingan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa baik target, realisasi maupun prosentase tingkat capaian antara tahun 2022 dan tahun 2023 ada sasaran yang tidak dapat dibandingkan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan indikator kinerja sasaran yang diukur. Dimana untuk pengukuran indikator sasaran tahun 2021 mengacu pada Renstra 2016-2021, sedangkan pengukuran indikator sasaran tahun 2022 mengacu pada renstra 2021-2026. Sesuai dengan Renstra 2021-2026, pengukuran kinerja tahun 2022 merupakan tahun pertama, sehingga belum muncul data pembandingan dengan tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk indikator yang sama antara tahun 2022 dan 2023 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas P3AP2KB sudah bisa mencapai target bahkan ada yang lebih dari 100%.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA s.d. AKHIR PERIODE RENSTRA

Perbandingan realisasi kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2023 sampai dengan periode Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2021-2026 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III. 5

Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra 2021-2026

DP3AP2KB Kota Blitar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi s/d 2023	Tingkat Kemajuan
Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase Kelembagaan PUG aktif	100%	63,3 %	63,3 %
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	100%	100 %
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	100%	100 %

Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Jumlah anak rata-rata yang dilahirkan wanita masa reproduksi)	1,94	1,92	101,03 %
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,36	85,28	99,90 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Sasaran 1 : Kelembagaan PUG yang aktif

Dengan indikator sasaran *Persentase Kelembagaan PUG aktif*, sampai dengan tahun 2023 ini tercapai 63,3 % dari target akhir Renstra 100% dan mengalami tingkat kemajuan sebesar 63,3 %

b. Sasaran 2 : Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan

Dengan indikator sasaran *Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan*, sampai dengan tahun 2023 ini tercapai 100 % dari target akhir Renstra 100 % dan mengalami tingkat kemajuan sebesar 100 %

c. Sasaran 3 ; Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak

Dengan indikator sasaran *Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan*, sampai dengan tahun 2023 ini tercapai 100 % dari target akhir Renstra 100 % dan mengalami tingkat kemajuan sebesar 100 %

d. Sasaran 4 : Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)

Dengan indikator sasaran *Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan ibu selama masa reproduksi)*, sampai dengan tahun 2023 ini tercapai 1,92 dari target akhir Renstra 1,94 dan mengalami tingkat kemajuan 101,03 %

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Dengan indikator sasaran *Nilai SAKIP Perangkat Daerah*, sampai dengan tahun 2023 ini tercapai 85,28 dari target akhir Renstra 85,36 dan mengalami tingkat kemajuan 99,90 %.

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal, disebutkan bahwa urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

a. Pendidikan

- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- e. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
- f. Sosial

Merujuk pada hal diatas, maka pada tahun 2023 DP3AP2KB Kota Blitar tidak berkewajiban melakukan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM). Namun demikian DP3AP2KB Kota Blitar berusaha untuk melakukan perbandingan capaian kinerja dengan DP3AP2KB Kabupaten/Kota lainnya ataupun Tingkat Provinsi, dengan perolehan data sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel III. 6
Perbandingan Realisasi Kinerja Daerah Dengan Kab/Kota Lain Tahun 2023

Kinerja	Indikator kinerja	Target		Realisasi		% Capaian	
		DP3AP2 KB Kab. Blitar	DP3AP2 KB Kota Blitar	DP3AP2 KB Kab. Blitar	DP3AP2 KB Kota Blitar	DP3AP2 KB Kab. Blitar	DP3AP2 KB Kota Blitar
Meningkatnya Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %
Meningkatnya Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	100%	100 %	100%	100 %	100%	100 %
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	TFR (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan ibu selama masa reproduksi)	1,85	2,13	2	1,92	91,89%	109,86%

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa :

- 1) *Meningkatnya Penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan* dengan indikator *Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan*, di Kabupaten Blitar realisasinya sebesar 100% dari target 100% dan persentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Sedangkan untuk Kota Blitar realisasinya sebesar 100 % dari target 100 % dan persentase capaian kinerjanya sebesar 100 %.

- 2) *Meningkatnya Penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak*, dengan indikator *Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan*, di Kabupaten Blitar realisasinya sebesar 100% dari target 100 % dan persentase capaian kinerjanya sebesar 100%.

Sedangkan untuk Kota Blitar realisasinya sebesar 100 % dari target 100 % dan persentase capaian kinerjanya sebesar 100 %.

- 3) *Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)*; dengan indikator *TFR (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan ibu selama masa reproduksi)*, di Kabupaten Blitar realisasinya sebesar 2 dan tidak ada target karena bukan merupakan indikator kinerja, sehingga tidak bisa diketahui capaian kinerjanya.

Sedangkan untuk Kota Blitar realisasinya sebesar 1,92 dari target 2,13 dan persentase capaian kinerjanya sebesar 110,28%.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas P3AP2KB Kota Blitar didukung dengan dana yang cukup memadai. Pada tahun 2023, jumlah anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut :

Tabel III.7

Persentase Realisasi Anggaran Sesuai Jenis Belanja

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Belanja Operasi	8.350.444.775	7.695.991.533	92,16
2	Belanja Modal	276.233.002	261.549.997	94,68
JUMLAH		8.626.677.777	7.957.541.530	92,24

Adapun untuk anggaran dan realisasi belanja per program / kegiatan tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel III.8
Persentase Realisasi Anggaran Per Urusan

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	%
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.394.230.701	5.104.860.377	94,64
2	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.232.447.076	2.852.681.153	88,25
JUMLAH		8.626.677.777	7.957.541.530	92,24

Tabel III.9
Persentase Realisasi Anggaran Per Program/Kegiatan pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE
		Rp	Rp	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.873.447.321,00	3.672.335.663,00	94,81%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.545.835,00	37.603.183,00	95,09%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.619.909,00	7.140.558,00	82,84%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.925.926,00	30.462.625,00	98,50%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.910.615.447,00	2.760.295.306,00	94,84%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.906.993.047,00	2.756.673.106,00	94,83%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.622.400,00	3.622.200,00	99,99%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	97.692.452,00	96.599.473,00	98,88%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	34.805.000,00	34.101.000,00	97,98%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	62.887.452,00	62.498.473,00	99,38%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	196.536.217,00	193.278.634,00	98,34%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.807.500,00	7.807.500,00	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.759.814,00	16.751.950,00	99,95%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.545.842,00	12.955.300,00	95,64%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9.183.500,00	8.650.000,00	94,19%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.533.490,00	16.836.320,00	96,02%

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.400.000,00	4.320.000,00	80%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	123.343.371,00	123.227.564,00	99,91%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.962.700,00	2.730.000,00	92,15%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.470.414,00	170.484.997,00	92,42%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	184.470.414,00	170.484.997,00	92,42%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	267.295.182,00	252.283.651,00	94,38%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.199.680,00	1.187.500,00	98,98%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.395.502,00	59.458.825,00	90,92%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200.700.000,00	191.637.326,00	95,48%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	177.291.774,00	161.790.419,00	91,26%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	90.079.174,00	77.423.300,00	85,95%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.202.600,00	25.754.000,00	98,29%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.010.000,00	57.613.119,00	96,01%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000,00	1.000.000,00	100%
II	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.037.246.962,00	1.018.340.486,00	98,18%
1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	85.588.129,00	83.673.755,00	97,76%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	85.588.129,00	83.673.755,00	97,76%
2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	353.734.939,00	344.405.736,00	97,36%
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	235.113.281,00	229.984.696,00	97,82%
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	118.621.658,00	114.421.040,00	96,46%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	597.923.894,00	590.260.995,00	98,72%

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	113.967.527,00	111.363.680,00	97,72%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	483.956.367,00	478.897.315,00	98,95%
III	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	171.587.963,00	125.674.839,00	73,24%
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	21.750.891,00	20.066.128,00	92,25%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	21.750.891,00	20.066.128,00	92,25%
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	68.247.310,00	31.662.918,00	46,39%
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	43.249.340,00	27.652.868,00	63,94%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.997.970,00	4.010.050,00	16,04%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.589.762,00	73.945.793,00	90,63%
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	29.368.700,00	27.473.077,00	93,55%
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	52.221.062,00	46.472.716,00	88,99%
IV	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	120.380.794,00	113.858.076,00	94,58%
1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	26.699.809,00	24.205.165,00	90,66%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.699.809,00	24.205.165,00	90,66%
2	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	93.680.985,00	89.652.911,00	95,70%

	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	26.920.686,00	26.825.288,00	99,65%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	66.760.299,00	62.827.623,00	94,11%
V	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	191.567.661,00	174.651.313,00	91,17%
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	106.356.020,00	102.682.947,00	96,55%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	106.356.020,00	102.682.947,00	96,55%
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.999.888,00	13.786.241,00	55,15%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	24.999.888,00	13.786.241,00	55,15%
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.211.753,00	58.182.125,00	96,63%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.211.753,00	58.182.125,00	96,63%

Tabel III.10

Persentase Realisasi Anggaran per Program/Kegiatan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSEN TASE
		Rp	Rp	
I	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	233.224.556,00	204.438.997,00	87,66%
1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	71.589.744,00	59.914.061,00	83,69%
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	24.999.936,00	16.762.312,00	67,05%

	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	46.589.808,00	43.151.749,00	92,62%
2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	161.634.812,00	144.524.936,00	89,41%
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	18.199.771,00	16.175.521,00	88,88%
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	17.435.041,00	17.045.800,00	97,77%
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	18.000.000,00	11.461.560,00	63,68%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	64.200.000,00	62.042.055,00	96,64%
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	43.800.000,00	37.800.000,00	86,30%
II	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.090.401.289,00	1.864.771.999,00	89,21%
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	593.466.311,00	514.223.928,00	86,65%
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	120.000.000,00	99.114.000,00	82,60%
	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	150.000.000,00	134.130.000,00	89,42%
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	99.000.000,00	93.512.300,00	94,46%
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	144.478.196,00	126.678.223,00	87,68%
	Pengendalian Program KKBPK	79.988.115,00	60.789.405,00	76%
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	310.735.839,00	305.956.171,00	98,46%
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	310.735.839,00	305.956.171,00	98,46%
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	786.982.191,00	671.716.849,00	85,35%
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	11.078.812,00	9.671.000,00	87,29%
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	271.468.194,00	200.309.800,00	73,79%
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	355.848.000,00	347.976.372,00	97,79%
	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	32.212.379,00	31.253.427,00	97,02%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	27.621.405,00	23.891.000,00	86,49%
	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	12.560.351,00	10.555.000,00	84,03%
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	76.193.050,00	48.060.250,00	63,08%
4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan	399.216.948,00	372.875.051,00	93,40%

	Kesertaan Ber-KB			
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	121.755.506,00	106.187.241,00	87,21%
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	277.461.442,00	266.687.810,00	96,12%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	908.821.231,00	783.470.157,00	86,21%
1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	908.821.231,00	783.470.157,00	86,21%
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	75.274.827,00	72.679.280,00	96,55%
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	412.421.458,00	297.319.227,00	72,09%
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	61.124.946,00	61.001.650,00	99,80%
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	352.470.000,00	97,91%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran yang terealisasi sebesar Rp 7.957.541.530,00 dari total anggaran Rp 8.626.677.777,00 atau sebesar 92,24%. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran dari Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2023 termasuk tinggi.

1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN

Untuk mengetahui persentase anggaran pada sasaran strategis dibandingkan dengan keseluruhan anggaran Belanja pada Dinas P3AP2KB Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel III. 11
Alokasi Pada Tiap Sasaran Pembangunan
DP3AP2KB Kota Blitar

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alokasi Anggaran	% Anggaran
1	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	1.037.246.962,00	12,02
2	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	171.587.963,00	1,99
3	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	311.948.455,00	3,62

4	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	3.232.447.076,00	37,47
5	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	3.873.447.321,00	44,90
	Total Anggaran		8.626.677.777,00	100,00

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa :

- a. Sasaran 1 : Kelembagaan PUG yang aktif;
dengan indikator *Persentase Kelembagaan PUG Aktif* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.037.246.962,00 dari anggaran dinas Rp. **8.626.677.777,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 1 adalah 12,02 % dari seluruh anggaran dinas.
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan
dengan indikator *Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 171.587.963,00 dari anggaran dinas Rp. **8.626.677.777,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 2 adalah 1,99 % dari seluruh anggaran dinas.
- c. Sasaran 3 : Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak
dengan indikator *Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 311.948.455,00 dari anggaran dinas Rp. **8.626.677.777,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 1 adalah 3,62 % dari seluruh anggaran dinas.
- d. Sasaran 4 : Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)
dengan indikator *Total Fertility Rate (TFR) Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.232.447.076,00 dari anggaran dinas Rp. **8.626.677.777,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 4 adalah 37,47 % dari seluruh anggaran dinas.
- e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja perangkat daerah;
dengan indikator *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.873.447.321,00 dari anggaran dinas Rp. **8.626.677.777,00**. Prosentase anggaran untuk sasaran 5 adalah 44,90 % dari seluruh anggaran dinas.

2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

Sedangkan pencapaian kinerja dan anggaran Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.12

Capaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	47,28	63,3	133,88	1.037.246.962	1.018.340.486	98,18
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100,00	100,00	100,00	1.037.246.962	1.018.340.486	98,18
	Persentase perempuan pengambilan keputusan public	46	59	128,26			
	Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	0,33	0,51	154,54			
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	171.587.963	125.674.839	73,24
Program Perlindungan Perempuan	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100,00	100,00	100,00	171.587.963	125.674.839	73,24
Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00			

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak	100,00	100,00	100,00	120.380.794	113.858.076	94,58
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100,00	100,00	100,00	191.567.661	174.651.313	91,17
Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR) Rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur	2,13	1,92	109,88			
Program Pengendalian Penduduk	Rata-rata usia kawin pertama wanita	23,01	25,0,3	108,78	233.224.556	204.438.997	91,17
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase peserta KB aktif	74,35	74,36	100,49	2.090.401.289	1.864.771.999	87,66
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,98	10,7	83,92			
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persentase anggota kelompok tribina dan UPPK yang ber KB	74,35	76,43	103,28	908.821.231	783.470.157	86,21
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	85,28	102,74	3.873.447.321	3.672.335.653	94,81
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83	85,06	102,48	3.873.447.321	3.672.335.653	94,81

3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk efisiensi penggunaan anggaran atas kinerja ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel III.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	Ket
1	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	133,88	98,18	1,36	Efisien
2	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	100	73,24	1,36	Efisien
3	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak	100	92	1,09	Efisien
4	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR), Rata-rata jumlah anak yang Dilahirkan oleh wanita usia subur	109,86	88,25	1,24	Efisien
5	Meningkatnya Kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	102,74	94,81	1,08	Efisien

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya :

1. Sasaran Strategis 1 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Kelembagaan PUG yang aktif” tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1.36 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 133,88% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 98,18%.
2. Sasaran Strategis 2 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan” tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1.36 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 73,24%.

3. Sasaran Strategis 3 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak” tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1.09 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 100% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 92%.
4. Sasaran Strategis 4 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)” tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1.24 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 109,86% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 88,25%.
5. Sasaran Strategis 5 : Dari tabel diatas menunjukkan bahwa untuk sasaran “Meningkatnya Kinerja perangkat daerah” tingkat efisiensi kinerja di banding penyerapan anggaran sebesar 1.08 dan dapat dikatakan telah efisien karena untuk mencapai kinerja sebesar 102,74% dilaksanakan dengan anggaran sebesar 94,81%.

C. PRESTASI / PENGHARGAAN

Selama tahun 2023 prestasi yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari perlombaan yang diadakan baik oleh tingkat Pemerintah Kota, Provinsi maupun Nasional, yaitu :

1. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dengan ***kategori Madya***
Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak (KEMENPPA) kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota atas komitmennya dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan ***kategori Madya***
Kota Layak Anak merupakan kota yang mampu merencanakan, menetapkan serta menjalankan seluruh program pembangunan dengan orientasi hak dan kewajiban anak, hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Setiap tahunnya ada penilaian dan penghargaan yang diberikan pada kota-kota ramah anak.
3. Juara I Lomba Kelompok KB PriaTingkat Provinsi Jawa Timur, yang diterima oleh Serma Hajib selaku Babinsa Koramil 0808/I Kota Blitar
4. Juara I Lomba Kampung KB kategori Pengembangan Pengelolaan kampung KB Tingkat kabupaten dan Kota yang diterima oleh kampung KB Sentosa Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo

5. Juara I Lomba Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang diterima oleh Kelompok KB Pria Gatotkaca.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Rencana Kinerja selama tahun 2023. Laporan ini juga akan dipakai sebagai sarana pengambilan keputusan dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat Langkah-langkah perbaikan dan atau peningkatan kinerja di masa-masa mendatang.

Dalam beberapa hal yang telah disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja sasaran strategis dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar pada tahun 2023 termasuk dalam kategori sangat berhasil. Hal ini dikarenakan capaian kinerjanya rata-rata 100,00%, walau dalam pelaksanaan masih terdapat beberapa kendala/permasalahan namun terdapat solusi yang telah dan akan dilaksanakan untuk menyelesaikannya. Adapun uraian capaian indikator sasaran strategis sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “Kelembagaan PUG yang aktif” dengan indikator kinerja “Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan” telah tercapai 66,3% dengan capaian kinerja sebesar 133,88% dengan kategori **Sangat Berhasil**.
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan” dengan indikator kinerja “Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan” dapat tercapai sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.
3. Sasaran Strategis “Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak” dengan indikator kinerja Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dengan demikian capaian kinerja sebesar 100% dari target 100%, dengan kategori **Sangat Berhasil**.
4. Sasaran strategis “Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)” dengan indikator kinerja Total Fertility Rate (TFR), telah tercapai sesuai target yaitu 1,92 dengan capaian kinerja 109,86% dengan kategori **Sangat Berhasil**.
5. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kinerja perangkat daerah” dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah, telah tercapai sesuai target yaitu 83 dengan

capaian kinerja 102,74% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kota Blitar untuk pencapaian indikator kinerja utama kedepan, antara lain :

1. Kelembagaan PUG yang aktif :

- a. Mengadakan sosialisasi, pelatihan serta pemberian edukasi kepada Organisasi dan Lembaga Kemasyarakatan terkait PUG secara rutin dan konsisten agar perempuan di Kota Blitar berpartisipasi aktif dalam pembangunan (baik dibidang Politik, Hukum, Sosial termasuk Bidang Ekonomi, pada tahun 2024 di Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- b. Melaksanakan pelatihan sistem data terpilah gender pada tahun 2024 di Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- c. Melaksanakan sosialisasi Perda PUG dan Penyusunan Perwali tentang Pedomasn Pelaksanaan Perda PUG nomor 3 Tahu 2023 pada tahun 2024 di Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG

2. Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan :

- a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan sesuai SOP, pada tahun 2024 pada Program Perlindungan Perempuan; Kegiatan Penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Pennguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- b. Untuk menjaga tingkat responsif penyelesaian kasusu kekerasan terhadap perempuan tetap 100%, maka :

1) Lebih mengoptimalkan peran PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) melalui pertemuan dan koordinasi dengan SATGAS Perlindungan Perempuan dan Anak dan lembaga lain;

2) Pembentukan Pos Curhat di masing-masing kelurahan.

3. Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak

- a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan terhadap anak sesuai SOP, pada tahun 2024 pada Program Perlindungan Khusus Anak; Kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK.
- b. Peningkatan kualitas SDM di Bidang Perlindungan Anak, dengan mengikuti pelatihan, seminar, workshop baik yang diadakan pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota
- c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat/anak-anak yang terkena dampak kekerasan untuk memanfaatkan rumah aman dan sosialisasi perlindungan anak pada tahun 2024 di Program Perlindungan Khusus Anak; Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota; Sub Kegiatan Penguatan Kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/Kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPPA.

4. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)

- a. Diperlukan inovasi strategi Promosi dan KIE bagi Pasangan Usia Subur muda/Generasi Milenial melalui Optimalisasi pemanfaatan KIE melalui Media Sosial, pada Tahun 2024 di Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal; Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang.

Demikian semoga Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2023 dapat sebagai evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta masukan bagi segenap pihak yang berkepentingan.

LAMPIRAN

MATRIK RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR
TAHUN 2021 - 2026

VISI KOTA BLITAR : TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
 MISI KE 1 : Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERA NGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULAS I PERHITUN	KONDISI AWAL			TARGET				URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL			TARGET						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,35	68,6	68,61	67,87	67,94	68	68,07	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	Jumlah lembaga PUG yang aktif dibagi jumlah lembaga PUG yang tersedia x 100	47,25	-	47,26	47,28	47,3	47,32	47,35	1. Penyusunan payung hukum tentang PUG 2. Peningkatan kapasitas perempuan 3. Peningkatan peluang partisipasi perempuan di ranah publik 4. Peningkatan peluang partisipasi perempuan di sektor pekerjaan formal	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	
											Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap	100	100	100	100	100	100	Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
											Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan anak yang dilaporkan dikali 100	100	100	100	100	100	100	Peningkatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

VISI KOTA BLITAR : TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI KE 2 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERA NGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULAS I PERHITUN	KONDISI AWAL			TARGET				URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL			TARGET						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	Rumus Laju Pertumbuhan Penduduk	0,67	1,06	0,6	0,67	0,67	0,65	0,65	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rumus Total Fertility Rate	2,14	2,13	1,92	2,12	2,12	2,12	2,11	1. Peningkatan partisipasi peserta KB aktif	PROGRAM PENGENDALIA N PENDUDUK	
																				2. Pendataan dan fasilitasi Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB	PROGRAM PEMBINA N KELUARGA BERENCANA (KB)	
																				3. Peningkatan kerjasama antar Stakeholders dalam pengendalian usia perkawinan di bawah umur (15-19 tahun)	PROGRAM PEMBERDAYA AN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	
4. Optimalisasi peningkatan keluarga sejahtera																						

VISI KOTA BLITAR	: TERWUJUDNYA KOTA BLITAR KEREN, UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT
MISI KE 5	: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERA NGAN
URAIAN	INDIKATOR	FORMULAS I PERHITUN	KONDISI AWAL			TARGET				URAIAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL			TARGET						
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perhitungan SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A (85,32)	A (83)	A (84)	A (84)	A (84,5)	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perhitungan SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A (85,32)	A (83)	A (84)	A (84)	A (84,5)	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis Kinerja 2. Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif	PROGRAAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	

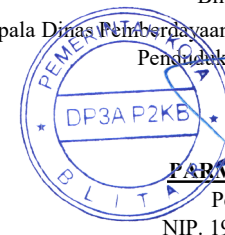
PENGUKURAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

NAMA OPD : DP3AP2KB KOTA BLITAR
TAHUN ANGGARA : 2023

NO	ASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase Kelembagaan PUG aktif	Jumlah lembaga PUG yang aktif dibagi jumlah lembaga PUG yang tersedia x 100	47.28%	63.30%	133.88		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1,037,246,962.00	1,018,340,486.00	98.18	
2	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di kali 100	100%	100%	100		Program Perlindungan Perempuan	171,587,963.00	125,674,839.00	73.24	
3	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan dibagi jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dikali 100	100%	100%	100		Program Pemenuhan Hak Anak	120,380,794.00	113,858,076.00	94.58	
								Program Perlindungan Khusus Anak	191,567,661.00	174,651,313.00	91.17	
4	Menurunnya Total Fertility Rate	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	Rumus Total Fertility Rate	2.13	1.92	109.86		Program Pengendalian Penduduk	233,224,556.00	204,438,997.00	87.66	
								Program Pembinaan Keluarga Berencana	2,090,401,289.00	1,864,771,999.00	89.21	
								Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	908,821,231.00	783,470,157.00	86.21	
5	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perhitungan SAKIP Perangkat Daerah	A (83,00)	85,29	102.74		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,873,447,321.00	3,672,335,663.00	94.81	

Blitar, 2 Januari 2024

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Blitar


FARMINTO, S. Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19710612 199301 1 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KOTA BLITAR

Sasaran Renstra	Indikator Sasaran Renstra	Target 2023	Program Perangkat Daerah	Indikator Program	Target 2023	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2023	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Dana				
Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase Kelembagaan PUG aktif	47.28%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase komposisi perempuan di sektor bisnis	0.33	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase Anggaran yang responsif Gender	32%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 dokumen	85,588,129				
				Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi dalam bidang politik hukum sosial dan ekonomi	20,53 %	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7 dokumen	235,113,281				
				Persentase perempuan pengambil keputusan publik	46					Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 organisasi	118,621,658			
										Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi	3 organisasi	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	21 lembaga	113,967,527
													Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	614 orang	483,956,367

Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100%	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	21,750,891
						Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100%	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1 orang	43,249,340
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 layanan	24,997,970
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100%	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	110 orang	29,368,700
									Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	52,221,062

Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100%	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase peningkatan pelemagaan pemenuhan hak anak	#####	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	26,699,809
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	100%	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100 anak	26,920,686
									Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	66,760,299
			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100%	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5 dokumen	106,356,020
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 layanan	24,999,888
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	100%	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2 dokumen	60,211,753

Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) Per perempuan usia reproduksi	Total Fertility Rate (TFR)	0,67	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	23.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	16.58%	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 dokumen	24,999,936		
								Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	3 pendidikan	46,589,808			
								Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase profil kependudukan yang tersedia	100%	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	18,199,771.00
								Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	6 Dokumen	17,435,041.00		
								Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1Dokumen	18,000,000.00		
								Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1 Laporan	64,200,000.00		
								Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	43,800,000.00		

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber- KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8,98	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Cakupan Pelaksanaan Advokasi KIE	3 kecam- atan	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organi- sasi	120,000,000
	Persentase peserta KB aktif	74,35				Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1 Dokum- en	-
						Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4 Dokum- en	150,000,000
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	6 Lapora- n	99,000,000
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4 Lapora- n	144,478,196

						Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3 Laporan	79,988,115			
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	100%	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	359 Orang	310,735,839
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50,35 %	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25 Laporan	11,078,812
					Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB				Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Orang	-	
					Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12 Orang	271,468,194	
					Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	13 Unit	355,848,000	
					Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	150 Orang	32,212,379	
					Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3 Laporan	27,621,405	

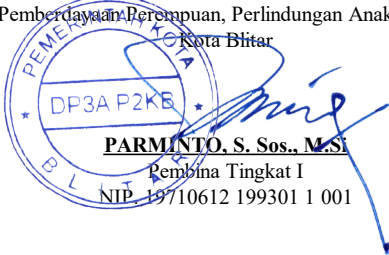
							Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan	12 Orang	12,560,351			
							Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	150 Orang	76,193,050			
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi pelayanan dan pembinaan kesertaan KB	100%	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	6 Kampung	121,755,506			
							Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	277,461,442			
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase anggota Kelompok Tribina & UPPKS yang ber-KB	74,35	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	100%	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6 Laporan	75,274,827
							Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Kelompok	412,421,458			

								Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Laporan	61,124,946
								Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	30 Laporan	360,000,000

Blitar, 20 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk

Kota Blitar


PARMINTO, S. Sos., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19710612 199301 1 001

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PARMINTO., S.Sos., M.Si**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**

Jabatan : **Walikota Blitar**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Walikota Blitar,
Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 20 Oktober 2023
**Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA,
PP dan KB Kota Blitar,**

PARMINTO., S.Sos., M.Si
Pembina Tk. IV/b
NIP. 197106121993011001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA BLITAR

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100.00()
2	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100.00()
3	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	47.28(Persentase)
4	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate	2.13(Indeks)
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.00(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	191,567,661.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	120,380,794.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	908,821,231.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	171,587,963.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,090,401,289.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1,037,246,962.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	233,224,556.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,873,447,321.00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Total:		8,626,677,777.00	

WALIKOTA
 Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 20 Oktober 2023
 Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB Kota
 Blitar,

PARMINTO, S.Sos., M.Si
 Pembina Tk.I-IV/b
 NIP. 19710612 199301 1 001